PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,s
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassarkota.go.id, **Pos-el** sekda@makassarkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR : 500.12/1035/Setda/Tahun 2026

T E N T A N G

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dan untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 4911 Tahun 2026, Nomor 4911.B Tahun 2026, dan Nomor 4986 Tahun 2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan hasil pengujian yang tercantum dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 4911 Tahun 2026, Nomor 4911.B Tahun 2026, dan Nomor 4986 Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal, 2 November 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

A. ZULKIFLY

Tembusan :
1. Wali Kota Makassar (sebagai laporan) di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar;
6. Yang Bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 500.12/1035/Setda/Tahun 2026
TANGGAL : 2 November 2026
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Data dan informasi identitas pribadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Dapat mengungkap identitas korban, menimbulkan trauma psikologi, stigma sosial, diskriminasi serta membahayakan keselamatan korban	Perlindungan privasi dan keselamatan korban tetap terjaga serta mendukung pemulihan korban	Relevan dapat dibuka atas persetujuan yg bersangkutan baik lisan maupun tertulis.
2	Data dan informasi identitas pelapor dan saksi kasus perempuan dan anak	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.	Dapat membahayakan keselamatn pelapor/saksi, menimbulkan intimidasi dan tekanan, serta menghambat proses penegakan hukum	Menjamin keamanan pelapor dan saksi serta mendukung kelancaran proses penanganan perkara	Selama proses hukum berlangsung dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3	Data dan informasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	Dapat merugikan kepentingan terbaik bagi anak, menimbulkan stigma sosial dan mengganggu tumbuh kembang anak	Menjami perlindungan anak dan menjaga masa depan anak dari stigma negatif	Sampai anak mencapai usia dewasa dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundangan
4	Dokumen hasil pendampingan psikologis, medis dan sosial korban	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.	Dapat mengungkap kondisi kesehatan, psikologis dan data pribadi korban yang bersifat rahasia	Kerahasiaan kondisi korban tetap terlindungi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi	Relevan dapat dibuka atas persetujuan yg bersangkutan baik lisan maupun tertulis.
5	Alamat rumah, nomor telepon , rekam medis, foto, video dan data pribadi korban/pelapor	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan membahayakan keamanan pribadi korban/pelapor	Menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi korban maupun pelapor	Relevan dapat dibuka atas persetujuan yg bersangkutan baik lisan maupun tertulis.

6	Berita acara pemeriksaan, kronologi kasus dan dokumen penanganan perkara yang masih dalam proses	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.	Dapat menghambat proses penyelidikan, penyidikan dan penanganan kasus	Menjaga objektivitas dan kelancaran proses penegakan hukum	Sampai proses hukum selesai
7	Informasi data rumah aman dan lokasi perlindungan korban	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT); b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.	Dapat membahayakan keamanan korban, pendamping dan petugas perlindungan	Menjamin keamanan lokasi perlindungan dan keselamatan korban	Selama lokasi masih digunakan sebagai tempat perlindungan
8	Dokumen audit, reviu, monitoring, evaluasi, konsultasi, dan pemantauan pengawasan yang masih	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;	Dapat mempengaruhi independensi auditor dan validitas hasil pemeriksaan, menimbulkan spekulasi	Menjaga objektivitas pemeriksaan, menghindari opini prematur publik, melindungi kerahasiaan	Sampai laporan final dan telah ditindaklanjuti.

	dalam proses dan ditindaklanjuti	c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan d. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.	publik dan berpotensi disalahgunakan pihak tidak berkepentingan	dokumen dan memperlancar proses pengawasan internal.	
9	Data identitas pelapor (whistleblower) / saksi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.	Dapat membahayakan keselamatan pelapor/saksi serta mengurangi efektivitas mekanisme pengaduan.	Melindungi keselamatan pelapor/saksi dan memperlancar efektivitas mekanisme pengaduan.	Permanen
10	Informasi terkait proses penyelidikan/pemeriksaan internal yang belum selesai	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Berisiko menghilangkan bukti, memengaruhi pihak yang diperiksa, mengganggu proses penyelidikan.	Menjaga efektivitas dan integritas proses pemeriksaan internal.	Sampai laporan final dan telah ditindaklanjuti.
11	Dokumen terkait proses hukum/penegakan hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Dapat mengganggu penyidikan, peradilan, dan dapat menimbulkan intervensi publik.	Membantu kelancaran penegakan hukum.	Sampai perkara berkekuatan hukum tetap
12	Konsep atau draft dokumen kebijakan yang masih dalam pembahasan internal dan belum ditetapkan	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17;	Dapat menimbulkan kesalahpahaman publik, mengganggu proses penyusunan kebijakan dan berpotensi disalahgunakan pihak	Menjamin agar publik hanya menerima informasi yang sahih dan mengamankan proses penyusunan kebijakan serta menghindari	Sampai dokumen mendapatkan penetapan

		c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	tidak berkepentingan.	penyalahgunaan dari pihak tidak bertanggung jawab.	
13	Data temuan audit yang terkait rahasia dagang/pihak ketiga	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17.	Dapat merugikan pemilik usaha, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan bisa membuka rahasia perusahaan.	Menjaga keadilan bisnis dan melindungi rahasia perusahaan yang diaudit.	Dapat merugikan pemilik usaha, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan bisa membuka rahasia perusahaan.
14	Data pribadi ASN, masyarakat / pihak ketiga dalam dokumen pengawasan	a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Data berpotensi disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab	Menjaga penyalahgunaan data pribadi dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Relevan dapat dibuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi
15	Dokumen rencana dan strategi pemeriksaan pengawasan	a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mempengaruhi dan menghambat proses pemeriksaan dan pengawasan	Memperlancar proses pemeriksaan dan pengawasan secara tepat waktu	Relevan dapat dibuka sepanjang proses pemeriksaan dan pengawasan selesai
16	Laporan hasil pemeriksaan dan reviu yang belum final dan	a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;	Dapat mengganggu dan menghambat proses	Memperlancar proses penyelesaian dan tindak	Sampai laporan final dan telah

	belum ditindaklanjuti dan dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti.	b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	penyelesaian dan tindak lanjut serta menghindari penyalahgunaan dokumen dari pihak tidak bertanggung jawab	lanjut dan melindungi kerahasian dokumen.	ditindaklanjuti.
17	Data Hasil Pemeriksaan Kelaikan Proteksi Pemadam Kebakaran Pada Gedung Perhotelan & Perkantoran	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17.	Dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik gedung terkait	Melindungi pemilik gedung dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Relevan dapat dibuka setelah dinyatakan layak oleh pihak Damkar
18	Data Pribadi Korban Kebakaran dan Penyelamatan	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu	Relevan dapat dibuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi
19	Data penyebab kebakaran selama proses investigasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi data penyebab kebakaran dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu	Terbuka setelah ada sertifikasi investigasi

20	Data dan informasi pribadi peneliti	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan data dari pihak tidak bertanggung jawab	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi
21	Foto, video, rekaman data responden penelitian dan pengguna data	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan data dari pihak tidak bertanggung jawab	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis dari responden penelitian dan pengguna data
22	Proses penilaian, berkas substansi proposal, dan nilai penjurian kegiatan lomba inovasi (misalnya: Makassar Innovation Award / Innovative Government Award Daerah).	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2	Berpotensi membocorkan ide inovasi pra-komersial/paten sebelum didaftarkan, memicu plagiarisme ide dan menimbulkan kecemburuan sosial atau sengketa hasil penilaian	Menghindari plagiarisme karya inovasi daerah, melindungi hak orisinalitas inovator dan menjaga objektivitas tim juri independen dari intervensi luar.	Sampai dengan hasil pemenang lomba diumumkan secara resmi oleh Pemerintah Kota (khusus nilai total), sedangkan detail substansi proposal

		Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.	yang belum bersifat final.		tetap dikecualikan sampai ada HAKI resmi.
23	Proposal Riset/ Penelitian dari pihak ketiga atau akademisi yang sedang diajukan ke BRIDA dan belum memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) / Paten.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.	Berpotensi Ide penelitian orisinal atau invensi teknologi baru milik peneliti dapat dicuri, ditiru, atau dipublikasikan oleh pihak lain tanpa izin (pelanggaran HAKI).	Menghindari Kerugian material dan in-material bagi peneliti/penemu akibat kehilangan hak eksklusif paten atau hak ciptanya.	Selama dokumen riset tersebut belum terdaftar resmi dalam sertifikasi HAKI atau belum mendapat izin publikasi tertulis dari peneliti utama.

24	Draf/Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) hasil kajian BRIDA yang masih dalam proses pembahasan internal dan belum disahkan oleh Wali Kota / Kepala Daerah.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan daerah.	Berpotensi menimbulkan kesimpangsiuran informasi, memicu spekulasi publik atau gejolak sosial terhadap kebijakan daerah yang formulasinya belum final dan masih bisa berubah.	Menghindari disinformasi di masyarakat dan menjaga fokus serta ruang diskusi yang objektif bagi tim ahli/analis kebijakan dalam merumuskan rekomendasi terbaik.	Sampai dengan rekomendasi tersebut diadopsi menjadi kebijakan resmi (Perwali/SK Wali Kota) atau telah dinyatakan terbuka oleh Kepala Daerah.
25	Data mentah (raw data) hasil kuesioner, wawancara mendalam (in-depth interview), atau Focus Group Discussion (FGD) terkait survei indeks kepuasan atau kajian sosial-ekonomi masyarakat tertentu.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi mengekspos preferensi politik, kondisi ekonomi spesifik, atau opini sensitif responden yang dapat memicu intimidasi atau penyalahgunaan data demografis lokal.	Menghindari pelanggaran privasi responden dan menjaga tingkat kepercayaan publik untuk bersedia menjadi informan dalam riset-riset daerah berikutnya.	Selamanya, atau dikecualikan hingga data tersebut dianonimkan secara total (identitas dihapus) dan hanya disajikan dalam bentuk agregat/grafik makro.

26	Data pribadi penderita HIV/AIDS	a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; b. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV AIDS	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia, dapat disalahgunakan oleh yang tidak berkepentingan & berpotensi terjadinya stigma dan diskriminasi	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia, menjaga stigma dan diskriminasi serta kerawanan di masyarakat	Relevan dapat dibuka jika mendapat persetujuan tertulis yang bersangkutan dan untuk kepentingan medis
27	Hasil Tes Pemeriksaan Kesehatan [jamaah haji]	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji; f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Relevan dapat dibuka jika mendapat persetujuan tertulis yang bersangkutan dan kepentingan khusus
28	Data dan isi rekam medis pasien	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang, data dapat dimanipulasi, dipalsukan	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi Undang-	Relevan dapat dibuka oleh pihak-pihak yang berhak Atas informasi rekam medis

		c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.	atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	undang	Berdasarkan peraturan perundang-undangan
29	Hasil Pemeriksaan Kesehatan Untuk Kepentingan Penegakan Hukum / Visum ed Repertum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien Visum Ed Repertum untuk mempermudah penegakan hukum	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan Pengadilan
30	Laporan penggunaan Narkotika dan Psikotropika	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.	Mengungkap data pasien narkotika yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien narkotika	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan
31	Foto/ video pasien tampak muka	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi Undang-undang	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan peraturan perundang-undangan
32	Laporan Keuangan dan Surat Pertanggung Jawaban beserta lampirannya sebelum	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2);	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan,	Relevan dapat dibuka setelah proses audit selesai

	diaudit oleh APIP, BPK dan badan pemeriksa lainnya.	b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 dan 18 ayat (1); d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; f. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; dan h. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23 dan Pasal 26.	berkepentingan dan jika diumumkan sebelum pemeriksaan, laporan dapat menghasilkan informasi yang salah.	membantu badan publik dalam menyusun dan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi.	
33	Arsip dinamis yang menyangkut dokumen perjalanan dinas yang didalamnya terdapat data-data pribadi	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Menghindari penyalahgunan oleh pihak yg tidak berkepentingan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Relevan dapat dibuka sepanjang ada persetujuan tertulis dari yg bersangkutan
34	Data keuangan pribadi yang tercantum dalam daftar gaji dan tunjangan pegawai.	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem	Dapat mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya	Menjaga penyalahgunaan data keuangan pribadi dari pihak yang tidak berkepentingan dan melindungi data	Relevan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan

		Keuangan untuk Penanganan Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; d. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.	penyalahgunaan data pribadi pegawai, mengganggu privasi dan keselamatan pegawai serta dapat menimbulkan dampak hukum jika data keuangan pribadi dimaksud disalahgunakan	keuangan pribadi pegawai dari kegiatan penyalahgunaan data.	persetujuan tertulis
35	Biodata pribadi dan dokumen kepegawaian pegawai (ASN dan Non ASN) baik manual maupun elektronik yang tersimpan dalam database kepegawaian	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas	Mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi pegawai, dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan; dan mengganggu privasi dan keselamatan pegawai.	Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi, melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan; dan menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Relevan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

		Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.			
36	Identitas pribadi pelapor, terlapor, dan pemohon informasi.	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi, melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan; dan menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Relevan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
37	Data identitas pengadu layanan baik secara daring maupun secara luring	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;	Mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan dan mengancam keselamatan fisik, psikis, dan rentan memicu konflik sosial	Melindungi kerahasiaan data pengadu layanan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan perizinan dan investasi	Relevan dapat dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

		d. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.	atau intimidasi oleh pihak terlapor terhadap warga atau pengadu.	secara aman tanpa rasa takut.	
38	Data Pribadi yang ada dalam dokumen perizinan penelitian, praktek dan kerjasama bidang kesehatan	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi,
39	Audit pemeriksaan reguler	a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17.	menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi data proses pemeriksaan	Terbuka setelah audit selesai dan ditindaklanjuti
40	Laporan Harta dan Kekayaan ASN bukan pejabat publik	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara.	menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data harta dan kekayaan ASN	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis dari ASN
41	Dokumen kasus kepegawaian ASN dan Non ASN yang	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17;	Menghindari penyalahgunaan dokumen dari pihak yang	Melindungi data dokumen kasus kepegawaian ASN dan	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis dari ASN

	melanggar disiplin, dijatuhi hukuman disiplin, maupun yang dijatuhi hukuman pidana/perdata yang belum berkekuatan hukum maupun yang sudah berkekuatan hukum tetap.	b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; e. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	tidak bertanggungjawab, dan mengungkap data pribadi ASN dan Non ASN yang bersifat rahasia.	non ASN	dan Non ASN
42	Dokumen daftar akun dokter dan tenaga kesehatan lainnya, catatan log informasi akses user pada Sistem Informasi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan daftar akun, catatan log informasi akses user pada pihak yang tidak memiliki kewenangan.	Terjaganya keamanan data elektronik	Selama berlaku dan masih digunakan
43	Internet Protocol/IP Address Private	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi	Selama masih digunakan

		Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.			
44	Source Code Aplikasi	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Berpotensi terjadinya kerusakan dan pencurian data	Melindungi keamanan sistem pada aplikasi	Selama masih digunakan
45	Sistem keamanan elektronik	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak lain, dan Menjaga/melindungi keamanan jaringan komputer.	Selama masih aktif
46	Kode Akses Elektronik	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga dan melindungi keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif

		Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.			
47	Sistem Management Database	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga dan melindungi keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif
48	Laporan insiden terhadap keamanan informasi	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Informasi sensitif dapat disalahgunakan oleh peretas atau pihak lain untuk merusak sistem atau mencuri data penting	Menjaga dan melindungi informasi sensitif agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Berlaku selama masih digunakan & masih relevan
49	Informasi Rahasia Bank: - Nama Nasabah Penyimpan - Nomor Rekening - Saldo Rekening - Mutasi Rekening - Data Deposito	a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	Membuka data nasabah, melanggar prinsip kerahasiaan bank, dapat merugikan kepentingan pribadi nasabah, hilangnya kepercayaan nasabah, potensi tindak	Menjaga kepercayaan nasabah, melindungi data nasabah dan meningkatkan kredibilitas bank	Relevan dapat dibuka sepanjang ada persetujuan tertulis nasabah dan untuk kepentingan khusus

	- Bilyet Deposito - Perjanjian Simpanan - Data Kredit Debitur - Perjanjian Kredit - Data Agunan	b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.3/2025 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat.	pidana pembobolan rekening dan gugatan hukum.		
50	Informasi Analisis Kredit : - Memorandum Analisis Kredit (MAK); - Credit Scoring; - Hasil BI Checking/SLIK; - Rekomendasi Komite Kredit; - Opini AO.	a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;	Menyebabkan kerugian kompetitif, dokumen berpotensi dimanfaatkan pesaing, adanya potensi kerugian finansial dan informasi yang bersifat kompetitif jika terbuka dapat merugikan posisi persaingan usaha bank	Menjaga kepercayaan nasabah, melindungi data nasabah dan meningkatkan kredibilitas bank	Relevan dapat dibuka sepanjang ada persetujuan tertulis nasabah dan untuk kepentingan khusus

		d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.3/2025 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat.			
51	Informasi Pengawasan OJK : - Laporan Pemeriksaan OJK; - Surat Pembinaan OJK; - Hasil Klarifikasi OJK; - Rencana Tindak Lanjut OJK; - Surat Menyurat terkait dengan pengawasan OJK	a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.3/2025 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat.	Membuka informasi Laporan Pengawasan OJK dapat mengganggu proses pengawasan yang sedang berjalan, dapat menimbulkan persepsi/keresahan publik yang belum tentu berdasar, serta berpotensi mengganggu hubungan pengawasan antara bank dan regulator.	Menutup informasi Laporan Pengawasan OJK menjaga kelancaran proses pengawasan oleh OJK, mencegah kesalahpahaman publik atas informasi yang belum final, serta menjaga hubungan kerja antara bank dan regulator.	Relevan dapat dibuka sepanjang ada persetujuan tertulis dari pihak yg diawasi
52	Informasi Audit dan Kepatuhan : - Laporan Audit Internal;	a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	Membuka informasi Laporan Audit Internal dapat mengurangi	Menutup informasi Laporan Audit Internal menjaga independensi	Sampai proses tindak lanjut/pengawasan

	- Program Audit Tahunan; - Temuan Audit; - Laporan Kepatuhan; - Laporan Whistleblowing	tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.3/2025 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat.	efektivitas fungsi audit dan kepatuhan, membuka celah bagi pihak terkait untuk menghindari temuan, serta berisiko disalahgunakan sebelum proses tindak lanjut selesai.	dan efektivitas fungsi audit dan kepatuhan serta melindungi proses tindak lanjut yang masih berjalan.	selesai
53	Informasi Manajemen Risiko : - Risk Register; - Profil Risiko; - Stress Testing; - Risk Appetite Statement; - ICAAP/Internal Capital Assessment (apabila diterapkan).	a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf; c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan	Mengganggu stabilitas bank dan informasi dapat disalahgunakan pihak lain	Menutup informasi manajemen resiko dapat menjaga stabilitas bank, melindungi strategi manajemen risiko yang bersifat internal, dan mencegah keresahan nasabah/pasar akibat informasi yang belum final.	Tidak terbatas selama masih berlaku

		Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.3/2025 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat.			
54	Informasi Teknologi Informasi : - Password Sistem; - User ID Administrator; - Konfigurasi Firewall; - Konfigurasi Server; - Source Code Aplikasi; - Database Nasabah; - Disaster Recovery Plan; - Business Continuity Plan; - Hasil Penetration Test; - Arsitektur Jaringan	a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.3/2025 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat.	Membuka informasi Password Sistem dapat membahayakan keamanan sistem dan data bank, membuka celah bagi peretasan/serangan siber, serta berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Menutup informasi Password Sistem menjaga keamanan sistem, jaringan, dan data bank dari ancaman siber, serta melindungi kelangsungan operasional layanan perbankan.	Selama sistem masih digunakan

55	Informasi dan risalah rapat : - Risalah Rapat Direksi; - Risalah Rapat Dewan Komisaris; - Bahan Presentasi Direksi terkait strategi perbankan; - Rencana Bisnis Bank (RBB) sebelum dipublikasikan; - RKAT sebelum disahkan	a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.3/2025 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat.	Membuka informasi Risalah Rapat bank dapat mengungkap strategi dan arah kebijakan bank yang belum final kepada pihak luar/pesaing, serta berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik atas kebijakan yang belum disahkan.	Menutup informasi Risalah Rapat dapat melindungi proses pengambilan keputusan internal Direksi/Dewan Komisaris, menjaga posisi strategis dan daya saing bank, serta mencegah kesalahpahaman publik sebelum kebijakan resmi ditetapkan.	Relevan dapat dibuka setelah disahkan
56	Informasi SDM dan Data Pribadi : - Data Pribadi Pegawai (NIK, alamat, rekening); - Data Penghasilan Pegawai; - Data Kesehatan Pegawai;	a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	Membuka informasi Data Pribadi Pegawai (NIK, alamat, rekening) melanggar hak privasi dan perlindungan data pribadi sesuai UU PDP, data berpotensi disalahgunakan pihak	Menutup informasi Data Pribadi Pegawai (NIK, alamat, rekening) melindungi hak privasi pegawai/pihak terkait, memenuhi kewajiban hukum sesuai UU Perlindungan Data	Relevan dapat dibuka sepanjang ada persetujuan tertulis yg bersangkutan dan untuk kepentingan hukum

	- Hasil Pemeriksaan Disiplin/Internal Investigasi; - Dokumen Rekrutmen yang Memuat Data Pribadi.	b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.3/2025 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat.	lain, serta dapat merugikan pihak yang bersangkutan.	Pribadi, serta menjaga kenyamanan dan keamanan yang bersangkutan.	
57	Dokumen data penerima bantuan ketahanan pangan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi privasi penerima layanan dari orang lain yang tidak bertanggung jawab	Relevan dapat dibuka sepanjang ada persetujuan tertulis yg beresangkutan
58	Dokumen laporan pengaduan masyarakat terkait ketahanan pangan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Identitas pelapor disalahgunakan pihak lain dan mengganggu proses pengawasan keamanan dan ketahanan pangan	Menjaga kerahasiaan data pelapor dan menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi publik	Sampai dengan hasil penyelesaian dari laporan pengaduan selesai
59	Penyusunan RKA dan DPA sebelum ditetapkan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan	Data berpotensi disalahgunak pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik	Sampai dokumen RKA dan DPA ditetapkan

		(2)			
60	Identitas pelapor/saksi sengketa ketenagakerjaan	a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Berpotensi disalahgunakan pihak yang tidak memiliki kewenangan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi dan untuk kepentingan hukum
61	Data identitas pribadi & hasil ujian peserta pelatihan ketenagakerjaan	a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Berpotensi disalahgunakan pihak yang tidak memiliki kewenangan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi
62	Data identitas pribadi pihak yang bersengketa	a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	- Berpotensi	- Membantu percepatan	Terbuka sepanjang

	antara pekerja dan perusahaan	tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	menimbulkan tekanan psikologis dan stigma negatif; - Menghambat proses penyelesaian sengketa perburuhan	proses penyelesaian perselisihan; - Menjamin kerahasiaan data pribadi pihak yg bersengketa	ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi
63	Data pribadi klaim jaminan sosial ketenagakerjaan	a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Berpotensi terjadinya penyalahgunaan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi

64	Data pribadi pencari kerja (KTP, ijazah, kontak, CV)	a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Berpotensi terjadinya penyalahgunaan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi
65	Perjanjian kerja antara tenaga kerja dan perusahaan	a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Berpotensi disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab dan melemahkan posisi tawar pekerja	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak lain	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi
66	Data by Name by Address/Data Pribadi spesifik pelaku UMKM	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dapat menyebabkan terjadinya	Menghindari terjadinya penyalahgunaan data	Terbuka sepanjang ada persetujuan

	serta pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi.	Pasal 17; b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35 s/d Pasal 38; c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti; d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	penyalahgunaan data pribadi pelaku UMKM pengurus dan pengawas pengelola koperasi	pribadi pelaku UMKM pengurus dan pengawas pengelola koperasi	tertulis pemilik data pribadi
67	Data Keuangan Perkembangan Usaha/Pendapatan UMKM	a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 3 huruf c; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4, Pasal 35 s/d Pasal 38.	Menyebabkan terjadinya penyalahgunaan data dari pihak tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan dari pihak tidak bertanggung jawab	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis yang bersangkutan / pemilik usaha
68	Peta Rencana Tata Ruang dalam Format *Shapefile*	a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir	Data berpotensi disalahgunakan pihak lain	Menghindari penyalahgunaan data shapefile rencana tata	Selama masih berlaku

		dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17.		ruang	
69	Informasi dan data pelapor, terlapor, dan dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang melalui laporan dan pengaduan langsung dan sistem pelaporan online	a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Data berpotensi disalahgunakan pihak lain	Menghindari penyalahgunaan dari pihak tidak bertanggung jawab	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pelapor
70	Rencana Operasi Penegakan Perda	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.	Menghambat proses penegakan Perda	Memperlancar proses penegakan Perda	Setelah pelaksanaan penegakan Perda selesai

71	Buku C (daftar pencatatan riwayat tanah yang memuat data pemilik dan riwayat peralihannya dan Buku F (Mencatat data objek fisik berupa letak dan batas tanah seperti nomor persil dan luas)	a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi; d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.	Data berpotensi disalahgunakan pihak lain	Menghindari terjadinya penyalahgunaan dokumen dari pihak yang tidak berkepentingan	Relevan dapat dibuka atas persetujuan pihak berwenang dan untuk kepentingan hukum
72	Dokumen Surat Keterangan Ahli Waris	a. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi; d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak	Dapat mengungkap data pribadi ahli waris dan dokumen berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang mencari keuntungan / tidak bertanggung jawab	Menjaga kerahasiaan data ahli waris dan mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab	Relevan dapat dibuka atas persetujuan pihak bersangkutan dan untuk kepentingan hukum

		Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.			
73	Akta Jual Beli dan Akta hibah	a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah terjadinya penyalahgunaan dokumen	Dapat dibuka atas permintaan dan persetujuan tertulis yang bersangkutan dan untuk kepentingan hukum.
74	Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagai bukti penguasaan lahan dan alas hak utama yang menjadi salah satu dasar untuk pengurusan sertifikat tanah	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah terjadinya penyalahgunaan	Dapat dibuka atas permintaan dan persetujuan tertulis yang bersangkutan dan untuk kepentingan hukum.

		Kepentingan Umum.			
75	Konfigurasi database dan aplikasi serta user name dan password	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Dapat menimbulkan perusakan dan pencurian data	Melindungi / mengamankan perangkat serta data dan melindungi hak akses	Selama aplikasi digunakan
76	Identitas Pribadi Penerima Bantuan dan Penduduk rentan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Data berpotensi disalahgunakan pihak lain	Menghindari terjadinya penyalahgunaan dokumen dari pihak yang tidak berkepentingan	Relevan dapat dibuka sepanjang ada persetujuan tertulis yg bersangkutan
77	Data dan Identitas Pelapor kasus pencemaran lingkungan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi; c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan	Dapat membahayakan keselamatan pelapor/pengadu,mencegah tekanan dan intimidasi terhadap pelapor atau potensi fisik pelapor, dapat menghambat proses	Untuk melindungi proses penegakan hukum,dan menjamin keselamatan pelapor dan mencegah penghilangan barang bukti	Selama informasi masih berkaitan dengan identitas pribadi pelapor

		Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan dan/atau Perusakan Hutan.	penegakan hukum,dan untuk mencegah penghilangan barang bukti		
78	Data Pengawasan Penataan Lingkungan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 tahun 2026 Tentang Pengawasan dan Sanksi Administrasi Bidang Lingkungan Hidup.	Berpotensi mengganggu proses penyelidikan pelanggaran dan penghilangan barang bukti serta berpotensi membocorkan metode operasional maupun formula rahasia milik pelaku usaha	Agar tidak menghambat penyelidikan, penyidikan dan proses sanksi administratif yang sedang berjalan dan melindungi rahasia dagang milik usaha/kegiatan	relevan dapat dibuka setelah ada persetujuan dari pelaku usaha;
79	Data Pribadi yang ada dalam dokumen perizinan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi
80	Dokumen Rahasia Dagang dan Rencana Kerja Investasi (Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang memuat detail finansial, teknologi, dan rahasia produksi).	a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-	Merusak iklim investasi daerah, membocorkan strategi bisnis ke kompetitor, dan mengakibatkan kerugian finansial pelaku usaha.	Menjaga kerahasiaan kekayaan intelektual, memberi kepastian hukum, dan meningkatkan kepercayaan investor.	Selama informasi memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik.

		Undang; c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.			
81	Dokumen Teknis atau Detail Arsitektur Bangunan (Gambar Teknis Bangunan atau As Built Drawing dalam berkas Persetujuan Bangunan Gedung atau Sertifikat Laik Fungsi).	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17.	Rentan disalahgunakan untuk mengancam keamanan fisik gedung (sabotase, perampokan) melalui detail cetak biru utilitas.	Menjamin keamanan dan keselamatan pengguna gedung serta menjaga rahasia sistem proteksi utilitas.	Selamanya, kecuali untuk penyidikan atau izin pemilik bangunan.
82	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Tim Teknis Perizinan yang masih dalam sengketa.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.	Memicu kesalahpahaman publik, spekulasi merugikan pelaku usaha, serta mengintervensi objektivitas tim teknis.	Memberikan independensi bagi tim teknis memberikan rekomendasi objektif sesuai aturan.	Ditutup sampai terbit keputusan final (izin terbit atau ditolak).
83	Identitas Pelapor dan/atau Pengadu (baik	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengancam keselamatan fisik, psikis, dan rentan	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam	Selamanya, kecuali pengadu atau

	melalui kanal daring maupun luring) pada aduan terkait pelayanan publik, indikasi pelanggaran perizinan, sengketa lahan usaha, atau dampak lingkungan investasi.	Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.	memicu konflik sosial atau intimidasi oleh pihak terlapor terhadap warga atau pengadu.	pengawasan penyelenggaraan perizinan dan investasi secara aman tanpa rasa takut.	pelapor memberikan persetujuan tertulis
84	Data pribadi penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berupa NIK, KK, rekening bank, nomor telepon	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 02/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.	Melanggar hak privasi masyarakat	Melindungi data pribadi	Selama data digunakan
85	Berita acara hasil verifikasi calon penerima RTLH sebelum ditetapkan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum	Menimbulkan konflik sosial	Menjamin objektivitas penetapan	Sampai penetapan penerima bantuan

		dan Perumahan Rakyat Nomor: 02/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.			
86	Backup database Sistem Informasi PSU Perumahan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Berpotensi terjadinya penyalahgunaan data	Menjamin keamanan data	Selama sistem digunakan
87	Data penghuni Rumah Susun Sewa Pemerintah Kota Makassar	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat mengungkap data pribadi penghuni Rusunawa dan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi	Menghindari terjadinya penyalahgunaan data pribadi	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi

		tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. d. Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumah Susun Pemerintah Kota Makassar.			
88	Data pribadi atau data perseorangan meliputi semua elemen biodata yang ada di database kependudukan termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK)	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	a. Penyalahgunaan data; b. Akan terjadi potensi kebocoran atau serangan siber.	a. Mencegah Penyalahgunaan data yang merugikan individu; b. Terciptanya kepercayaan masyarakat; c. Melindungi Hak Pribadi Warga Negara	Relevan dapat dibuka sepanjang ada persetujuan tertulis yg bersangkutan dan untuk kepentingan hukum
89	User ID dan Password Aplikasi terkait Layanan Administrasi Kependudukan	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	a. Rawan Penyalahgunaan kewenangan dalam pemrosesan dan verifikasi ajuan administrasi kependudukan; b. Rawan penyalahgunaan	a. Melindungi pemilik akun / operator SIAK dari perubahan yang melanggar aturan dalam pemrosesan verifikasi ajuan administrasi kependudukan; b. Melindungi pemilik	Selama hak akses masih berlaku/aktif

		Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	pengajuan administrasi kependudukan bukan oleh yang bersangkutan karena produk dari ajuan yang berupa TTE dapat secara langsung di unduh melalui akun Sistem Layanan Informasi Administrasi Kependudukan Dalam jaringan (Sakura)	akun dan keluarga dari penyalahgunaan dokumen administrasi kependudukan yang merugikan	
90	Register Akta Pencatatan Sipil	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Rawan penyalahgunaan data untuk kejahatan perbankan dan transaksi keuangan serta tindakan kriminal lainnya	Melindungi kerahasiaan dan kebenaran data penduduk	Relevan dapat dibuka untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan
91	Data Balikan Pemanfaatan Data Kependudukan yang	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan	Rawan penyalahgunaan data untuk kejahatan perbankan dan transaksi	Menjamin kerahasiaan, keutuhan serta penyimpangan data	Terbuka selama mendapatkan izin tertulis dari yang

	sudah diberikan hak akses oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri melalui Perjanjian Kerjasama dengan OPD / Lembaga Pengguna	Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 96a; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Pasal 1 dan Pasal 7.	keuangan serta tindakan kriminal lainnya	kependudukan oleh pihak yang tidak berkepentingan	bersangkutan
92	Kontrak kerja sama PD Pasar dengan pihak ketiga	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rahasia Dagang Pasal 3; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; d. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Makassar.	Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kerahasiaan bisnis	Selama kontrak masih berlaku
93	Rencana strategis internal PD Pasar sebelum diumumkan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17;	Berpotensi merugikan perusahaan	Melindungi kepentingan perusahaan	Relevan dibuka setelah dokumen ditetapkan

	resmi	b. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang Pasal 3; c. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Makassar.			
94	Data pribadi pedagang, dokumen aset dan infrastruktur pasar	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. c. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Makassar	Data dan dokumen berpotensi disalahgunakan oleh pihak yg tidak berkepentingan	Menghindari penyelahgunaa data dan doumen dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Relevan dapat dibuka setelah ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi dan untuk kepentingan hukum
95	Data Pribadi Pemilik Objek Cagar Budaya, Objek Diduga Cagar Budaya dan Objek Cagar Budaya Yang Dipelihara	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Data berpotensi disalahgunakan pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi dan menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Relevan dapat dibuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi
96	Informasi Data Pribadi Pemilik Sanggar Seni Binaan	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17;	Data berpotensi disalahgunakan pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi dan menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Relevan dapat dibuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi

		c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.			
97	Data Keuangan : Rincian rekening bank instansi, Bukti transaksi keuangan dan dokumen pertanggungjawaban yang belum diaudit atau belum dipublikasikan, Password atau akses aplikasi keuangan.	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Data berpotensi disalahgunakan pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan dokumen dan melindungi pemilik data pribadi	Relevan dapat dibuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi
98	Dokumen Hasil Penilaian Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang Belum Ditetapkan : Berisi hasil kajian, rekomendasi, dan pertimbangan teknis sebelum penetapan status cagar budaya.	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Data berpotensi disalahgunakan pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi penyalahgunaan dokumen dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Relevan dapat dibuka setelah hasil penilaian ditetapkan
99	Dokumen Hasil Inventarisasi Koleksi Museum yang belum Dipublikasikan : Data lengkap koleksi, kondisi fisik dan nilai historis yang masih dalam proses verifikasi.	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Data berpotensi disalahgunakan pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi penyalahgunaan dokumen dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Relevan dapat dibuka setelah hasil inventarisasi ditetapkan
100	Data pribadi penerima	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Data berpotensi	Menghindari	Relevan dpt dibuka

	bantuan bencana alam dan bencana non-alam (sosial), serta data pengungsi	tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	disalahgunakan pihak yg tdk bertanggung jawab	penyalahgunaan data dr pihak yang tidak bertanggung jawab	sepanjang ada persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi dan untuk kepentingan hukum
101	Risalah atau notulen rapat tertutup DPRD	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Mengganggu proses pengambilan keputusan dan pembahasan internal	Berpotensi disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab	Relevan dapat dibuka setelah ditindaklanjuti dan untuk kepentingan hukum
102	Dokumen yang berkaitan dengan perkara hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penegakan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan	Sampai perkara berkekuatan hukum

	yang masih berproses	Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	hukum	dokumen	tetap
103	Rincian HPS yang terdiri dari perhitungan HPS, hasil survei dan harga satuan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44; c. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang Pasal 3; d. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26.	a. Informasi hasil survey dan harga satuan dapat dimanfaatkan penyedia tertentu untuk melakukan pengaturan harga (price fixing) dengan pesaing; b. Hasil survei bisa berisi data harga dari penyedia tertentu yang seharusnya dijaga kerahasiaannya agar tidak merugikan usaha penyedia tersebut; c. Berisiko penyedia menawar harga sangat dekat dengan HPS (kompetisi semu); dan d. Dapat menimbulkan “tawar persis di bawah HPS” yang mengurangi kompetisi sehat.	Menjaga persaingan usaha yang sehat; dan Mengurangi risiko kolusi/tender diarahkan	5 tahun (menyesuaikan jadwal tetensi arsip)
104	Gambar Rancangan Pekerjaan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat disalahgunakan untuk plagiarisme; dan	a. Keamanan dan kerahasiaan: beberapa	5 tahun (menyesuaikan

		Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang Pasal 3.	b. Menimbulkan risiko keamanan	desain menyangkut fasilitas vital seperti instalasi layanan publik yang berisiko jika detail teknis terbuka ke pihak yang tidak berkepentingan; b. Menghindari penyalahgunaan: Dokumen teknis dapat digunakan untuk tujuan di luar pengadaan, misalnya dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial, atau bahkan sabotase; dan c. Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual: Konsultan perencana atau pihak pembuat desain memiliki hak moral atas karya teknis yang tidak bisa disebar luas.	jadwal retensi arsip)
105	Penawaran Teknis	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17;	Risiko kompetisi tidak sehat meningkat dan strategi teknis jadi	a. Menghindari penyalahgunaan: Dokumen teknis dapat	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip)

		b. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang Pasal 3; c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.	mudah ditiru	digunakan untuk tujuan di luar pengadaan, misalnya dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial, atau bahkan sabotase; dan b. Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual: Konsultan perencana atau pihak pembuat desain memiliki hak moral atas karya teknis yang tidak bisa disebar bebas.	namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait
106	Jawaban Sanggah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan	Menjaga kerahasiaan Mekanisme penyelesaian sengketa	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait

107	Jawaban Sanggah Banding	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.	- Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan; - Dapat mengganggu Kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait
108	Surat Perjanjian Kemitraan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Dapat mengganggu Kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi kerahasiaan data pribadi	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait
109	Data dan informasi pribadi eks narapidana terorisme (eks Napiter)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang	Dikhawatirkan ada ketakutan terhadap hubungan sosial yang berdampak pada keluarganya	eks Napiter dapat dengan mudah bersosialisasi tanpa ada rasa minder, takut, malu dll	Relevan dapat dibuka sepanjang ada persetujuan secara tertulis dari pemilik data dan untuk kepentingan

		Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.			hukum
110	Data dan informasi informan (intelijen) Pemerintah Kota Makassar	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Data berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga kerahasiaan data informan (intelijen)	Relevan dapat dibuka setelah masa tugas berakhir, ada persetujuan secara tertulis dari pemilik data dan untuk kepentingan hukum
111	Data potensi dan penanganan konflik sosial di masyarakat	a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik pasal 17.	Berpotensi membahayakan keamanan daerah	Menghindari terjadinya potensi konflik yang lebih besar	Permanen
112	Data dan informasi hasil asesmen, uji kompetensi, konseling dan penilaian kinerja ASN	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun	Hasil penilaian kinerja ASN memuat rekam jejak, kelemahan, kelebihan, serta data rahasia pribadi pegawai yang jika dipublikasikan berpotensi disalahgunakan pihak lain.	Melindungi hasil penilaian kinerja ASN disalahgunakan pihak lain	Relevan dapat dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan untuk kepentingan hukum

		2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.			
113	Dokumen PNS yang mengajukan kenaikan pangkat	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	Data / dokumen merupakan data pribadi yang apabila dibuka berpotensi disalahgunakan pihak lain	Melindungi data seseorang sehingga dapat menghindari penyalahgunaan data pribadi	Relevan dapat dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan untuk kepentingan hukum
114	Dokumen mutasi ASN dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional Umum.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	Dapat mengganggu proses mutasi ASN	Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan, menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja dan menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang	Sampai terbitnya SK Mutasi ASN
115	Dokumen hasil pembinaan perkawinan	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang	Melindungi data pribadi Pegawai	terbuka sepanjang ada persetujuan

	dan perceraian PNS dan surat izin PNS yang mengajukan perceraian	Pasal 17; b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.	dilakukan pembinaan dan mengajukan perceraian	Negeri Sipil yang bersifat rahasia	tertulis dari ASN dan untuk kepentingan hukum
116	Identitas pribadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan PPPK berupa Kartu Keluarga, KTP-el, Akta Kelahiran, Buku Nikah, Akta Cerai, KP4, NPWP dan nomor kontak.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.	Dapat mengungkap identitas pribadi calon pegawai dan berpotensi disalahgunakan pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari terjadinya penyalahgunaan data pribadi	terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis dari CPNS dan untuk kepentingan hukum
117	Data pribadi wajib pajak	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; e. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak	Data berpotensi disalahgunakan pihak lain yang tidak berkepentingan.	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan	Relevan dapat dibuka setelah ada permintaan aparat penegak hukum, atas permintaan sendiri dan alasan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

		Daerah dan Retribusi Daerah.			
118	Data Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Formulir Pendaftaran Objek Pajak yang telah diisi	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; e. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Data berpotensi disalahgunakan pihak lain yang tidak berkepentingan.	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan	Relevan dapat dibuka setelah ada permintaan aparat penegak hukum, atas permintaan sendiri dan alasan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
119	Perlindungan Data Pajak (data wajib pajak/objek pajak/data transaksi)	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; e. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Data berpotensi disalahgunakan pihak lain yang tidak berkepentingan.	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan	Relevan dapat dibuka setelah ada permintaan aparat penegak hukum, atas permintaan sendiri dan alasan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
120	Surat Ketetapan Pajak	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Data berpotensi	Menghindari	Relevan dapat

	Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Nota Perhitungan Pajak Daerah (Reklame), Nota Perhitungan Sementara (Excel)	tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; e. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	disalahgunakan pihak lain yang tidak berkepentingan.	penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan	dibuka setelah ada permintaan aparat penegak hukum, atas permintaan sendiri dan alasan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
121	Dokumen hasil pemeriksaan pajak perorangan dan badan usaha	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; e. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Data berpotensi disalahgunakan pihak lain yang tidak berkepentingan.	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan	Relevan dapat dibuka setelah ada permintaan aparat penegak hukum, atas permintaan sendiri dan alasan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
122	Dokumen keberatan, banding, gugatan, atau sengketa pajak yang	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	Berpotensi mempengaruhi independensi	Menjaga kerahasiaan proses penyelesaian sengketa pajak	Sampai perkara berkekuatan hukum tetap

	masih berproses	tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; e. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	penyelesaian sengketa dan menghambat proses peradilan.		
123	Data penagihan aktif, penyidikan, dan penegakan hukum perpajakan	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; e. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Menghambat proses penagihan aktif penyidikan dan penegakan hukum perpajakan	Memperlancar proses penagihan aktif penyidikan dan penegakan hukum perpajakan	Sampai proses hukum selesai
124	Data rekening bank, bukti transfer, virtual account, QRIS, dan dokumen pembayaran Wajib Pajak	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022	Dapat dimanfaatkan untuk tindak kejahatan perbankan dan penyalahgunaan transaksi elektronik.	Menghindari tindak kejahatan perbankan dan penyalahgunaan transaksi elektronik.	Selama data masih digunakan

		tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; e. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.			
125	Username, password, PIN, OTP, token, API Key, sertifikat elektronik, dan konfigurasi keamanan sistem informasi perpajakan	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; e. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Membahayakan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan berpotensi menyebabkan kebocoran data.	Menghindari terjadinya kebocoran data.	Selama sistem digunakan
126	Profil risiko Wajib Pajak, hasil analisis kepatuhan, intelligence perpajakan, dan strategi pengawasan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan	Mengurangi efektivitas pengawasan dan membuka celah penghindaran pajak	Meningkatkan efektifitas dan memperlancar proses pengawasan pajak	Selama strategi masih digunakan

		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.			
127	Telaahan staf, legal opinion, dan konsep keputusan yang belum ditetapkan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Mempengaruhi independensi proses penyusunan kebijakan dan berpotensi menimbulkan salah persepsi publik.	Memperlancar proses penyusunan kebijakan.	Sampai keputusan ditetapkan
128	Data yang diperoleh dari Perbankan, dan PPAT yang berdasarkan PKS bersifat terbatas	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.	Melanggar perjanjian kerja sama antarinstansi dan mengurangi kepercayaan dalam pertukaran data.	Menjamin pelaksanaan kerjasama antar instansi	Relevan dapat dibuka setelah ada persetujuan pihak yg menandatangani PKS
129	Data lokasi penyimpanan uang, brankas, server, pusat data, dan sistem keamanan fisik Bapenda	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat membahayakan keamanan aset daerah serta sistem informasi pemerintahan.	Menjamin keamanan aset fisik Bapenda	Selama fasilitas digunakan
130	Dokumen pendukung	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003	Dapat digunakan oleh	Menghindari	Dapat dibuka

	yang menjadi dasar penetapan aset Pemerintah Kota Makassar (sertifikat, bukti hibah dan dokumen sejenis lainnya)	tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	pihak yg tidak bertanggung jawab	penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	setelah mendapat persetujuan pihak terkait dan untuk kepentingan hukum
131	Dokumen identitas pemilik tanah (KK, KTP, NPWP dll serta salinan sertifikat yang memuat data pribadi)	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi; d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak	Penyalahgunaan data pribadi, risiko penipuan atau pemalsuan identitas	Melindungi data pribadi warga negara, serta mencegah penyalahgunaan data pribadi dari risiko penipuan dan pemalsuan	Dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan dan untuk kepentingan hukum.

		Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.			
132	Dokumen yang dilampirkan masyarakat dalam pelayanan pertanahan (KK, KTP, NPWP, sertifikat tanah, akta jual beli, surat pernyataan pribadi dan dokumen sejenisnya)	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi; d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.	Dapat mengungkapkan data pribadi pemohon dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan (Penipuan, pemalsuan, pencurian identitas dan spekulasi kepemilikan tanah)	Melindungi data pribadi warga negara. Mencegah penyalahgunaan data pribadi dan risiko penipuan dan pemalsuan	Dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan dan untuk kepentingan hukum.
133	Dokumen pertanahan (sertipikat, SK Hak, peta bidang, dokumen penguasaan.pemilikan, data perolehan tanah dll)	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi; d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan	Mengungkap data pribadi pemilik, memicu potensi penipuan, spekulasi dan konflik kepemilikan	Menjaga kepastian hukum dan perlindungan data pemilik tanah	Dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan dan untuk kepentingan hukum.

		Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.			
134	Dokumen tanah ex-Gemeente, eigendom verponding (peta, risalah, dokumen pengalihan dan arsip pertanahan terkait) Tanah milik Pemerintah Kota Makassar	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi; d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.	Menimbulkan klaim sepihak, spekulasi, konflik kepemilikan dan penyalahgunaan arsip	Melindungi kepastian hukum aset daerah serta ,menjaga ketertiban administrasi pertanahan	Dapat dibuka atas kepentingan hukum.
135	Detail tanah untuk fasilitas vital (kantor pemerintah, TNI/Polri, jaringan listrik/air/ telekomunikasi)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang	Berpotensi disalahgunakan untuk tindakan yang mengancam keamanan	Keamanan dan kerahasiaan fasilitas vital terjamin	Selama tanah digunakan sebagai obyek strategis/fasilitas vital

		Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.			
136	Hasil appraisal nilai tanah sebelum diumumkan resmi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.	Menimbulkan spekulasi harga, manipulasi informasi dan konflik sosial	Proses musyawarah berjalan lebih kondusif dalam menentukan taksasi	Sampai hasil appraisal diumumkan resmi
137	Dokumen hukum yang termasuk data pribadi pemohon rekomendasi pengangkatan anak	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	a. Penyalahgunaan pihak lain dapat memberikan citra yang negatif terhadap institusi; b. Jika diumumkan sebelum adanya putusan, akan terjadi informasi yang salah; c. Berpotensi menguntungkan salah satu pihak; dan d. Kebocoran informasi kepada pihak yang	a. Menjaga kerahasiaan data pemohon; b. Memperlancar proses pemberian rekomendasi; dan c. Melindung pihak-pihak yang terkait.	Relevan dapat dibuka setelah proses pengangkatan anak selesai dan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.

		2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.	tidak berkepentingan sehingga berdampak terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.		
138	Data pribadi yang termasuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan penerima program kesejahteraan sosial baik APBN dan APBD.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.	Jika diberikan dapat disalahgunakan oleh pemohon;	a. Melindungi dari kegaduhan publik dan menjaga kerahasiaan data pribadi.	Relevan dapat dibuka atas persetujuan yg bersangkutan dan untuk kepentingan hukum
139	Laporan penanganan kasus Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam proses pelayanan.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial pasal 31 ayat 2.	Jika diberikan dapat disalahgunakan oleh pemohon, menghambat kesuksesan penanganan kasus karena ada pengungkapan secara prematur, berdampak pada proses pelayanan yang lebih bertanggung jawab; dan memberikan	Melindungi dari kegaduhan publik, menjaga keberhasilan penanganan kasus; dan menjaga kerahasiaan data pribadi.	Sampai dengan terbitnya laporan akhir penangan kasus dan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.

			pengetahuan kepada masyarakat tentang proses penanganan kasus bagi PPKS.		
140	Data temuan audit yang terkait rahasia dagang/pihak ketiga	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17.	Dapat merugikan pemilik usaha, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan bisa membuka rahasia perusahaan.	Menjaga keadilan bisnis dan melindungi rahasia perusahaan yang diaudit.	Permanen
141	Data atau rahasia dagang milik pelaku usaha/UKM yang mencakup laporan keuangan, aset, rencana bisnis, dan strategi pemasaran yang dapat mengganggu persaingan usaha.	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat merugikan pemilik usaha, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan bisa membuka rahasia perusahaan.	Menjaga keadilan bisnis dan melindungi rahasia perusahaan yang diaudit.	Permanen

		tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17; c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.			
142	Data Pribadi terkait pihak ketiga: alamat rumah, telepon, dll. Meliputi pelaku usaha, pejabat Atase Perdagangan/ITPC, konsumen & pelaku usaha dalam sengketa, penanggung jawab perusahaan, buyer berdasarkan SKA, penanggung jawab kawasan industri.	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan	Apabila dipublikasikan mengungkap kepentingan perlindungan HKI, persaingan usaha tidak sehat, dan isi akta otentik yang bersifat pribadi.	Menjaga otentikasi akta yang bersifat pribadi serta melindungi HKI dan persaingan usaha yang sehat.	Permanen; atau terbuka bila ada persetujuan tertulis pihak bersangkutan.

		Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.			
143	Dokumen pihak ketiga terkait Izin Usaha Industri dan Kawasan Industri.	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	Mengungkap kepentingan perlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi HKI dan persaingan usaha tidak sehat.	5 tahun; atau terbuka atas perintah pengadilan/lembaga pemerintah.
144	Data teknis hasil kalibrasi, hasil pengujian	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan kepentingan perusahaan terkait HKI	Menjaga HKI dan mencegah persaingan	5 tahun; atau terbuka atas

	mutu barang, berita acara pemeriksaan verifikasi teknis dan berita acara pemeriksaan lapangan pihak ketiga (klien) pada UPT Metrologi Legal Disperin Kota Makassar	b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Meteorologi Legal.	dan persaingan usaha.	usaha tidak sehat.	perintah pengadilan/lembaga pemerintah.
145	Dokumen Pengawasan Perdagangan (Tertib Niaga), Barang Beredar dan Jasa yang masih dalam proses (sebelum audit kinerja).	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	Menghambat penyelidikan/penyidikan tindak pidana dan membuka dokumen yang bersifat pribadi.	Mempermudah penyelidikan/penyidikan serta melindungi persaingan usaha.	5 tahun; atau terbuka atas perintah pengadilan/lembaga pemerintah.
146	Data terkait penilaian dari Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang masih dalam proses.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.	Dipublikasikan dapat membahayakan keamanan organisasi.	Melindungi organisasi dari beredarnya informasi berisiko yang ditemukan LPK.	5 tahun; atau terbuka atas perintah pengadilan/lembaga pemerintah.
147	Data Ekspor Pihak Ketiga: nilai ekspor pengguna SKA, legalitas & omzet perusahaan, kapasitas produksi.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan	Data berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan persaingan usaha tidak sehat sehingga berisiko	Melindungi terjadinya persaingan usaha tidak sehat.	5 tahun; atau terbuka atas perintah pengadilan/lembaga pemerintah.

		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	mematikan daya saing eksportir		
148	Dokumen Legalitas Pelaku Usaha Pihak Ketiga.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Data berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi terjadinya persaingan usaha tidak sehat.	5 tahun; atau terbuka atas perintah pengadilan/lembaga pemerintah.
149	Data Industri Besar dan Industri Kecil Menengah (Pihak Ketiga): Nilai Investasi, Kapasitas Produksi, Bahan Baku.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 69 dan 70 ayat 2.	Data berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi terjadinya persaingan usaha tidak sehat.	5 tahun; atau terbuka atas perintah pengadilan/lembaga pemerintah.
150	Data Pribadi Calon	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Data berpotensi	Melindungi	5 tahun; atau

	Penerima Calon Lokasi (CPCL) penerima subsidi/penerima program Operasi Pasar Murah (OPM) dan data pribadi penerima subsidi/penerima program OPM	tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	disalahgunakan pihak tidak berkepentingan	penyalahgunaan data dari pihak tidak berkepentingan	terbuka atas perintah pengadilan/lembaga pemerintah.
151	Data Jumlah Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan (BANKEU) Revitalisasi Pasar Rakyat yang belum diaudit.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	Mengungkap dokumen yang bersifat rahasia.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	10 tahun; atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
152	Data Pribadi spesifik pelaku UMKM dan IKM	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35 s.d Pasal 38; c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta	Mengungkap dokumen yang bersifat pribadi	Menghindari terjadinya penyalahgunaan data pribadi pelaku UMKM dan IKM	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi

		Kerja menjadi Undang-Undang.			
153	Data hasil evaluasi kinerja direksi dan dewan pengawas BUMD Kota Makassar	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD.	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi hasil evaluasi	Dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan dan untuk kepentingan hukum.
154	Data detail hasil penilaian seleksi terbuka calon anggota dewan pengawas/anggora komisaris dan anggota direksi BUMD Kota Makassar	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD.	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi hasil evaluasi	Dapat dibuka atas permintaan dan persetujuan tertulis para ahli waris dan untuk kepentingan hukum.
155	Data Pribadi peserta	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	dapat menyebabkan	Menghindari terjadinya	Terbuka sepanjang

	didik yang terdiri dari Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Nomor Induk Siswa	tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	terjadinya penyalahgunaan data pribadi peserta didik	penyalahgunaan data pribadi peserta didik	ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi
156	Data Pribadi tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi tenaga kependidikan	Menghindari terjadinya penyalahgunaan data pribadi tenaga kependidikan	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi
157	Data pribadi pelaku, korban dan satuan tugas dan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan;	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang	dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi	Menghindari terjadinya penyalahgunaan data pribadi	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi

		Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.			
158	Soal dan kunci jawaban ujian sekolah/nasional	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat mengungkap rahasia negara yang menjadi dasar dalam pengukuran kemampuan peserta didik serta berpotensi disalahgunakan pihak lain	Menghindari terjadinya penyalahgunaan dokumen negara yang bersifat rahasia	Terbuka setelah proses ujian selesai

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



A. ZULKIFLY